

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR

Laporan Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2014



Tromol Pos 485 Bogor 16004
Jawa Barat

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, 1 Juli 2014

Kepala Balai,

Ir. Tri Harsi, MP
NIP 196812261991032001

	Hal
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Ringkasan	iii - v
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
A.1. Dasar Hukum	5
A.2. Kebijakan Teknis	5
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.4. Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	15
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	15
B.2. Belanja Negara	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	15
C.1. Aset Lancar	22
C.2. Aset Tetap	22
C.3. Piutang Jangka Panjang	26
C.4. Aset Lainnya	27
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	27
C.6. Ekuitas Dana Lancar	28
C.7. Ekuitas Dana Investasi	29
D. Pengungkapan Penting Lainnya	30
Lampiran Laporan-laporan Pendukung	
LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
Neraca Percobaan	
Laporan Barang Pengguna	
Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK	.
Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2012 dan 2011
Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang
Tabel 4 : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNB
Tabel 5 : Perbandingan Realisasi PNB TA 2012 dan 2011
Tabel 6 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012
Tabel 7 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2012 dan 2011
Tabel 8 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011
Tabel 9 : Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011
Tabel 10 : Perbandingan Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011
Tabel 11 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Tabel 12 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Tabel 13 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Tabel 14 : Rincian Piutang Bukan Pajak
Tabel 15 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek
Tabel 16 : Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
Tabel 17 : Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
Tabel 18 : Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Tabel 19 : Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Tabel 20 : Rincian Persediaan
Tabel 21 : Rincian Aset Tetap
Tabel 22 : Rincian Saldo Tanah
Tabel 23 : Rincian Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
Tabel 24 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
Tabel 25 : Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Tabel 26 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Tabel 27 : Rincian Aset Lainnya
Tabel 28 : Rincian Aset Tak Berwujud
Tabel 29 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 1 Juli 2014
Kepala Balai,

Ir. Tri Harsi, MP
NIP 19681226 199103 2 001

RINGKASAN

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2014.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.435.669.782,- atau mencapai 98,69 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp441.450.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	30 JUNI 2014			JUNI TA 2013
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	441.450.000	435.669.782	98,69	363.842.900
Belanja Negara	31.645.050.000	9.429.714.838	29,80	12.303.534.174

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 30 Juni 2014 dan Juni 2013

Jumlah Aset adalah sebesar Rp.27.489.725.142,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.7.291.867.682,- Aset Tetap sebesar Rp.27.489.725.142,- dan Aset Lainnya sebesar Rp.1.217.266,-

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp.300.000.000,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp..34.482.810.090,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.6.991.867.682,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.27.490.942.408,-

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/ (penurunan)	
	30 Juni 2014 (Rp)	30 Juni 2013 (Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	7.291.867.682	6.522.312.600	769.555.082	10.55
Aset Tetap	27.489.725.142	20.991.442.461	6.498.282.681	23.63
Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Aset Lainnya	1.217.266	1.345.400	(128.134)	(90.47)
Jumlah Aset	34.782.810.090	27.515.100.461	7.267.709.629	79.11
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	300.000.000	200.000.000	100.000.000	66.67
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	6.991.867.682	6.306.176.855	685.690.827	9.80
Ekuitas Dana Investasi	27.490.942.408	20.992.787.861	6.498.154.547	23.63
Jumlah Ekuitas Dana	34.482.810.090	27.298.964.716	7.183.845.374	20.83
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	34.782.810.090	27.515.100.461	7.267.709.629	20.89

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2014 DAN 30 JUNI 2013

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 JUNI 2014		30JUNI TA 2013	
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak		441.450.000	434.872.782	98.69	363.842.900
Jumlah Pendapatan		441.450.000	434.872.782	98.69	363.842.900
BELANJA					
1. Belanja Pegawai		4.370.000.000	1.560.966.287	35.72	4.076.724.246
2. Belanja Barang		18.445.790.000	6.269.409.463	33.99	11.944.174.426
3. Belanja Modal		8.829.260.000	1.599.339.088	18.11	2.131.038.450
Jumlah Belanja		31.645.050.000	9.429.714.838	29.80	18.151.937.122

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR
NERACA
PER 30 JUNI 2014 DAN 30 JUNI 2013

(dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	30 JUNI 2014	30 JUNI 2013
ASET			
Aset Lancar			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	Rp --	Rp --
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	Rp --	Rp --
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	Rp --	Rp --
Jumlah Kas dan Bank		Rp --	Rp --
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	Rp --	Rp --
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.5	Rp --	Rp --
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	Rp --	Rp --
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TPA	C.1.7	Rp --	Rp --
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.1.8	Rp --	Rp --
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TGR	C.1.9	Rp --	Rp --
Jumlah Piutang (Bersih)		Rp --	Rp --
Belanja Dibayar Dimuka	C.1.10	Rp --	Rp --
Persediaan	C.1.11	Rp 6.991.867.682	Rp 5.224.698.500
Jumlah Aset Lancar		Rp 6.991.867.682	Rp 5.224.698.500
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2.1	Rp 13.617.849.001	Rp 13.617.849.001
Peralatan dan Mesin	C.2.2	Rp 6.943.411.988	Rp 3.977.229.300
Gedung dan Bangunan	C.2.3	Rp 10.934.344.486	Rp 6.696.901.600
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	Rp 3.253.357.300	Rp 1.610.301.450
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	Rp --	Rp --
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	Rp (7.259.237.633)	Rp --
Jumlah Aset Tetap		Rp 27.489.725.142	Rp 25.902.281.351
Piutang Jangka Panjang			
C.3			
TPA	C.3.1	Rp --	Rp --
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	C.3.2	Rp --	Rp --
TP/TGR	C.3.3	Rp --	Rp --
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.3.4	Rp --	Rp --
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		Rp --	Rp --
Aset Lainnya			
C.4			
Aset Lain-lain	C.4.1	Rp 3.844.000	Rp 3.844.000
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2	Rp (2.626.734)	Rp --
Jumlah Aset Lainnya		Rp 1.217.266	Rp 3.844.000
JUMLAH ASET		Rp 34.782.810.090	Rp 31.130.823.851
KEWAJIBAN			
C.5			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	Rp --	Rp 9.426.939
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	Rp 300.000.000	Rp --
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.5.3	Rp --	Rp --
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.4	Rp --	Rp --
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp 300.000.000	Rp 9.426.939
JUMLAH KEWAJIBAN		Rp 300.000.000	Rp 9.426.939
EKUITAS DANA			
C.6			
Ekuitas Dana Lancar			
Cadangan Piutang	C.6.1	Rp --	Rp --
Cadangan Persediaan	C.6.2	Rp 6.991.867.682	Rp 5.224.698.500
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.6.3	Rp --	Rp (9.426.939)
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.6.4	Rp --	Rp --
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.6.5	Rp --	Rp --
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		Rp 6.991.867.682	Rp 5.215.271.561
Ekuitas Dana Investasi			
C.7			
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.7.1	Rp 27.489.725.142	Rp 25.902.281.351
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.7.2	Rp 1.217.266	Rp 3.844.000
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		Rp 27.490.942.408	Rp 25.906.125.351
JUMLAH EKUITAS DANA		Rp 27.490.942.408	Rp 31.121.396.912
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		Rp 34.782.810.090	Rp 31.130.823.851

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/ 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR

Rencana Strategis

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 57/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 ditetapkan struktur organisasi Balai Embrio Ternak Cipelang, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Balai Embrio Ternak Cipelang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya beralamat di Kp. Pasir Pogor RT.28 RW.04 Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

Balai Embrio Ternak Cipelang terdiri dari :

- a. Kepala Balai
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Pelayanan Teknik Pemeliharaan Ternak
- d. Kepala Seksi Pelayanan Teknik Produksi dan Aplikasi
- e. Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Visi

Visi Balai Embrio Ternak adalah *"Menjadi Sumber benih dan Bibit dan Ternak Unggul Nasional"*

B. Misi

Untuk merealisasikan visitersebut, misi Balai Embrio Ternak adalah :

1. Meningkatkan populasi donor untuk optimalisasi produksi embrio.
2. Optimalisasi resipien guna meningkatkan kelahiran hasil TE untuk penyediaan bibit sapi unggul.
3. Meningkatkan pemanfaatan sapi lokal sebagai sumber bibit dan pelestarian plasma nutfah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, penyebaran informasi, pemasaran produk, monitoring dan evaluasi serta kerjasama dalam penyediaan bibit sapi unggul
5. Meningkatkan sumberdaya manusia yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, apresiasi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pengembangan profesi.
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan tertib administrasi, perencanaan, keuangan, koordinasi, komunikasi dan kolaborasi.

C. Tujuan

1. Meningkatkan ketersediaan bibit ternak sapi unggul
2. Mempercepat peningkatan mutu genetik ternak sapi Indonesia
3. Adanya jaminan kualitas genetik bibit/embrio melalui import semen untuk mencegah resiko terjadinya inbreeding.
4. Adanya jaminan kualitas bibit melalui import embrio untuk program replacement donor maupun pejantan yang telah beradaptasi dengan lingkungan.
5. Meningkatkan jumlah resipien di BET Cipelang sehingga program *replacement* bibit pejantan dan donor dapat berjalan secara kontinue.
6. Meningkatkan pemanfaatan bibit unggul hasil TE oleh B/BIB nasional maupun daerah untuk pejantan penghasil semen
7. Meningkatkan pemanfaatan bibit unggul hasil TE betina sebagai donor pengganti (replacement) di BET Cipelang.

8. Meningkatkan pelayanan dalam bioteknologi Transfer Embrio melalui kerjasama antara Balai Embrio Ternak dengan UPT/D, Dinas, LSM/Koperasi, perusahaan swasta dan petani peternak melalui KSO/KST yang berwawasan sistem dan usaha agribisnis
9. Meningkatkan produktivitas ternak lokal untuk produksi embrio
10. Meningkatkan kebuntingan dan kelahiran bibit ternak sapi unggul bersertifikat melalui TE
11. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas dan petani dalam mengadopsi/memanfaatkan paket teknologi reproduksi (TE).

D. Sasaran

1. Terpenuhinya *replacement* donor di BET Cipelang dan di UPT/D dan *Village Breeding Centre* yang sudah beradaptasi dengan lingkungan (40 ekor/tahun).
2. Terhindarnya inbreeding dan meningkatkan heterosigositas untuk optimalisasi performans ternak sapi donor (inbreeding maksimal 6.25%).
3. Peningkatan mutu genetik dan populasi sapi perah dan sapi potong dengan wilayah sebaran yang luas melalui kelahiran hasil transfer embrio sehingga bertambahnya wawasan petani peternak dalam membudidayakan (*on farm agribisnis*) ternak dari usaha sambilan menjadi usaha pokok yang menguntungkan.
4. Terpenuhinya kebutuhan bibit sapi nasional dan *replacement Bull* di BIB Nasional dan daerah (40 ekor/tahun).
5. Mengurangi impor bibit sapi unggul.
6. Meningkatnya pembangunan peternakan yang profesional dalam mendukung keberhasilan program penyediaan bibit ternak sapi unggul.
7. Terbentuknya wilayah pengembangan aplikasi TE dan sentra-sentra penghasil bibit ternak sapi unggul.
8. Mendukung Program Swasembada Daging Sapi 2014.

E. Kebijakan

Beberapa kebijakan Balai Embrio Ternak Cipelang untuk mencapai tujuan dalam periode 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas embrio
2. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas bibit ternak
3. Kebijakan pelayanan prima kepada masyarakat
4. Kebijakan pengembangan SDM

F. Strategi

Strategi Balai Embrio Ternak dalam mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas embrio dengan peningkatan jumlah donor,
2. Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka produksi embrio sesuai dengan SOP,
3. Pemberian sertifikat embrio dan anak hasil TE,
4. Pengajuan akreditasi standar manajemen produksi embrio,
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas bibit ternak hasil TE yang dilakukan dengan peningkatan jumlah resipien di BET dan daerah,
6. Peningkatan mutu pakan dan manajemen kesehatan hewan pada sapi donor dan resipien di dalam dan luar BET,
7. Penjaringan ternak bibit unggul di daerah,
8. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang produksi, distribusi dan transfer embrio serta bibit hasil TE melalui peningkatan dan pemantapan kerjasama dengan stakeholder,
9. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka operasional kegiatan teknis dan administrasi,
10. Pemberian informasi, monitoring dan evaluasi kegiatan produksi dan aplikasi transfer embrio,
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, supervisi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3.PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh

dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 30 Juni 2014 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian..

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar

oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain

karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/20110 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Penyusutan
Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2013, Balai Embrio Ternak Cipelang telah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp.435.669.782.

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp.435.669.782,- atau mencapai 98.69 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.441.450.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4
Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Hasil Peternakan & Perikanan	410.450.000	178.075.000	43.39
2	Pendapatan Sewa gedung dan Bangunan	9.838.800	4.804.900	48.84
3	Pendapatan Pemindahtanganan BMN	16.490.000	0	0
4	Pendapatan Jasa Giro	1.000	0	0
5	Pendapatan Denda Keterlambatan	0	3.813.109	0
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai	5.020.200	30.389.004	605.33
7	TGR		218.587.769	0
8	Penerimaan Kembali Persekot/UM. Gaji		0	0
	Jumlah	441.450.000	435.669.782	98.69

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja
Negara Rp.
9.429.714.838

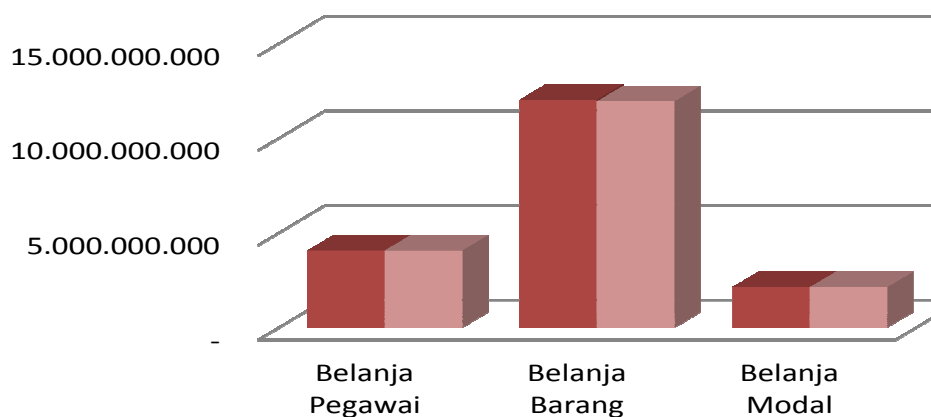
Realisasi belanja Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor pada TA 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp.9.429.714.838,- atau sebesar 29.80 persen dari anggaran. Anggaran belanja Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2014 adalah sebesar Rp31.645.050.000. Anggaran dan realisasi belanja TA 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
51	Belanja Pegawai	4.370.000.000	1.560.966.287	35.72
52	Belanja Barang	18.445.790.000	6.269.409.463	33.99
53	Belanja Modal	8.829.260.000	1.599.339.088	18.11
	Jumlah	31.645.050.000	9.429.714.838	29.80

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014



Realisasi belanja TA 2014 mengalami penurunan sebesar Rp.2.873.072.512,- dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain untuk belanja pegawai mengalami penurunan disebabkan oleh adanya pegawai yang pindah, untuk belanja barang adanya pengurangan anggaran sedangkan untuk belanja modal mengalami kenaikan. Perbandingan realisasi belanja TA 2014 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 7
Perbandingan realisasi Belanja TA 2014 dan 2013

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		TA2014	TA2013	R	%
51	Belanja Pegawai	1.560.966.287	1.650.990.987	(90.024.700)	(5.45)
52	Belanja Barang	6.269.409.463	9.481.391.363	(3.211.981.900)	(33.87)
53	Belanja Modal	1.599.339.088	1.170.405.000	428.934.088	36.64
	Jumlah	9.429.714.838	12.302.787.350	(2.873.072.512)	(23.35)

Belanja Pegawai
Rp.1.798.114.514

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.1.798.114.514,- dan Rp 1.881.905.507,- Penurunan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan adanya kepindahan pegawai. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013

URAIAN	TA.2014 (Rp)	TA.2013 (Rp)	Naik/(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.188.254.900	1.304.126.200	(115.871.300)	109,75
Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.007	30.672	(9.665)	146,01
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	97.231.110	108.331.770	(11.100.660)	111,42
Belanja Tunj. Anak PNS	33.027.256	37.347.838	(4.320.582)	113,08
Belanja Tunj. Struktural PNS	23.940.000	23.400.000	540.000	97,74
Belanja Tunj. Fungsional PNS	163.200.000	82.970.000	80.230.000	50,84
Belanja Tunj. PPh PNS	20.811.521	19.361.027	1.450.494	93,03
Belanja Tunj. Beras PNS	100.942.720	109.485.000	(8.542.280)	108,46
Belanja Uang Makan PNS	145.856.000	165.793.000	(19.937.000)	113,67
Belanja Tunjangan Umum PNS	24.830.000	31.060.000	(6.230.000)	125,09
Belanja uang lembur	-	-	-	-
Belanja Pegawai Transito	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	1.798.114.514	1.881.905.507	(83.790.993)	104,66
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	1.798.114.514	1.881.905.507	(83.790.993)	104,66

Belanja Barang
Rp6.269.409.463
3

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 6.269.409.463,- dan Rp 9.481.391.363,-. Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 3.211.981.900,- atau 33.87 persen antara lain disebabkan adanya pengurangan anggaran sehingga perlu adanya penjadwalan dan penghitungan ulang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9
Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013

Uraian	TA2014 (Rp)	TA2013 (Rp)	Naik/(Turun)	%
Belanja				
a. Barang Non Operasional	1.317.292.000	4.218.216.285	3.856.306.290	1.065,54
Belanja Jasa	26.600.000	98.160.821	9.340.143	10,52
Belanja Pemeliharaan	991.651.870	951.450.000	262.750.000	38,15
Belanja Perjalanan Dinas	532.311.600	442.847.320	88.747.320	25,06
Realisasi Belanja Bruto	2.867.855.470	5.803.662.926	4.267.030.253	277,69
<i>Pengembalian Belanja</i>	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	2.867.855.470	5.803.662.926	4.267.030.253	277,69

Belanja
Moda Rp1.969.468.588

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 1.969.468.588,- dan Rp. 2.131.038.450,-. Penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 281.954.862,- antara lain disebabkan adanya pemotongan anggaran tahun 2014 sehingga untuk pelaksanaan belanja modal mengalami penghitungan atau penjadwalan pelaksanaan. Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013

Uraian	TA2014 (Rp)	TA2013 (Rp)	Naik/(Turun)	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	737.397.088	422.466.400	314.930.688	74.55
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	957.969.850	1.469.223.600	(511.253.750)	34.80
Jalan, Jaringan dan Irigasi	153.716.650	239.348.450	(85.631.800)	35.78
Belanja Modal Fisik Lainnya	120.385.000	0	0	0
Realisasi Belanja Bruto	1.969.468.588	2.131.038.450	(281.954.862)	13.23
<i>Pengembalian Belanja</i>	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	1.969.468.588	2.131.038.450	(281.954.862)	13.23

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013 masing-masing sebesar Rp.300.000.000,- dan Rp. 200.000.000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Jumlah tersebut terdiri dari :

Tabel 11

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	Tahun 2014	Tahun 2013
1	Bank	Rp -	Rp -
2	Uang Tunai	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp -	Rp -

Kas di Bendahara
Penerima Rp 0

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,- yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 12

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Jenis	Tahun 2014	Tahun 2013
1	Bank	Rp -	Rp -
2	Uang Tunai	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp -	Rp -

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0,-

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel13
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara	Rp -
2	Pajak PPh yang Belum Disetor	Rp -
3	Pengembalian Belanja belum disetor ke kas negara	Rp -
	Jumlah	Rp -

Piutang Bukan Pajak Rp.0,-

C.1.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp.0,-

C.1.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek per 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

BL TPA Rp.0,-

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. TPA adalah merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca berupa angsuran atas penjualan rumah negara.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag. Lancar TPA Rp.0,-

C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan.

BL TGR Rp.0,-

C.1.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag. Lancar TP/TGR Rp.0,-

C.1.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Belanja Dibayar Di Muka Rp.0,-

C.1.10 Belanja Dibayar Di Muka

Belanja Dibayar Di Muka per 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Belanja di bayar di muka merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan atas pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal perikatan.

Persediaan Rp.6.991.867.682

C.1.11 Persediaan

Persediaan per 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013 masing-masing adalah sebesar Rp.6.991.867.682,- dan Rp.6.522.312.600,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Persediaan

No.	Uraian	2014	2013
1	Barang Konsumsi	Rp 1.477.600	Rp 157.188.000
2	Barang Untuk Pemeliharaan	Rp 5.169.260	Rp 2.638.800
3	Suku Cadang	Rp 527.191.940	Rp 1.119.002.300
4	Bahan Baku	Rp 5.705.611.500	Rp 2.530.633.000
5	Persediaan Lainnya	Rp 752.417.382	Rp 2.512.850.500
Jumlah		Rp 6.991.867.682	Rp 6.322.312.600

Aset Tetap
Rp.26.365.114.086

C.2 Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp.27.489.725.142,- dan Rp.20.991.442.461,- yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor per 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	2014	2013
1	Tanah	Rp 13.617.849.001	Rp 13.617.849.001
2	Peralatan dan Mesin	Rp 6.943.411.988	Rp 5.147.634.300
3	Gedung dan Bangunan	Rp 10.934.344.486	Rp 6.696.901.600
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 3.253.357.300	Rp 1.610.301.450
5	Akumulasi Penyusutan	Rp (7.259.237.633)	Rp (6.081.243.890)
Jumlah		Rp 27.489.725.142	Rp 20.991.442.461

Tanah
Rp13.617.849.001,-

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor per 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.13.617.849.001,- dan Rp.13.617.849.001,- tidak ada perubahan.

Peralatan dan Mesin
Rp.6.943.411.988

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp..6.943.411.988,- dan Rp.6.085.629.900,- Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.857.782.088,- yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin. Sedangkan perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian adalah sebesar Rp.857.782.088,- Tidak ada realisasi belanja modal dengan hasil perolehan aset dari pembelian merupakan kapitalisasi aset yang perolehannya bersumber dari belanja barang namun memenuhi kriteria sebagai Peralatan dan Mesin. Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013	Rp 6.085.629.900,00
Mutasi tambah:	
- Pembelian	Rp 857.782.088,00
- Transfer Masuk	Rp -
Mutasi kurang:	
- Penghapusan	Rp -
Saldo per 30 Juni 2014	Rp 6.943.411.988,00

Gedung dan Bangunan
Rp10.934.344.486

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp.10.934.344.486,- dan Rp.10.249.270.986,- Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 sebesar Rp. 685.073.500,-

Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013	Rp 10.249.270.986,00
Mutasi tambah:	
- Pembelian	Rp -
- Pengembangan Langsung	Rp 685.073.500,00
Mutasi kurang:	
-	Rp -
Saldo per 30 Juni 2014	Rp 10.934.344.486,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp.3.253.357.300

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.253.357.300,- dan Rp.3.049.740.650,- Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 203.616.650,- sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2013	Rp 3.049.740.650,00
Mutasi tambah:	
- Pembelian	Rp 203.616.650,00
Mutasi kurang:	
-	Rp -
Saldo per 30 Juni 2014	Rp 3.253.357.300,00

Aset Tetap Lainnya
Rp3.844.000

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp3.844.000,- dan Rp3.844.000,- yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Mutasi Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013	Rp 3.844.000,00
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp -
Mutasi kurang:	
- Akumulasi Penyusutan	Rp (2.626.734,00)
Saldo per 30 Juni 2014	Rp 1.217.266,00

Konstruksi dalam
Pengerjaan Rp 0

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.3 Piutang Jangka Panjang

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp 0

C.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 merupakan tagihan atas penjualan BMN yang pembayarannya melalui angsuran yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan.

Penyisihan Piutang tak
Tertagih- Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp 0

C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan.

Tuntutan
Perbendaharaan
Rp 0

C.3.3 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Penyisihan Piutang tak
Tertagih - Tuntutan
Perbendaharaan Rp 0

C.3.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Aset Lainnya Rp 0

C.4 Aset Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Aset Tak Berwujud Rp 0

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain Rp 0

C.4.2 Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Kewajiban Jangka

KEWAJIBAN

Pendek

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Utang kepada Pihak

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Ketiga Rp.7.943.787

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp..0,- dan Rp.0,- merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Balai Embrio Ternak Cipelang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp0	
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp0	
Total		Rp0	

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.300.000.000,- dan Rp.0,- merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pendapatan Yang
Ditangguhkan Rp 0

C.5.3 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 30 Juni 2014.

Pendapatan Diterima

C.5.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Dimuka Rp 0

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar
Rp9.078.430.007

C.6 Ekuitas Dana Lancar

C.6.1 Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

C.6.2 Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.6.991.867.682,- dan Rp. 9.086.373.794,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk persediaan.

C.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar minus Rp.0,- dan minus Rp.7.943.787,- Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

C.6.4 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

Barang/Jasa yang Harus Diterima per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Perkiraan tersebut merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan dari kepada pihak lain

C.6.5 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar minus Rp.0,- dan minus Rp.0,-. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Ekuitas Dana
Diinvestasikan
Rp26.366.395.419

C.7 Ekuitas Dana Diinvestasikan

C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.27.490.942.408,- dan Rp.26.366.395.419,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap

Diinvestasikan Dalam
Aset Lainnya
Rp1.281.333

C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.1.217.266,- dan Rp. 1.281.333,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

Belanja Akrual terdiri dari Belanja Langganan Daya dan Jasa (Listrik dan Telpon) untuk pemakaian bulan Juni yang akan dibayarkan pada bulan Juli 2014 sebesar Rp. 5.340.000,- yang masih bersifat perkiraan berpedoman pada pembayaran bulan sebelumnya.

D.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor.

5174/Kpts/KU.410/12/2013 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014 dan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Balai Embrio Ternak Cipelang, Nomor.22003/KP.5.2/F.2.7/10/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor ditetapkan sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Tri Harsi, MP
Pejabat Pembuat Komitmen	: Anny Rosmayanti, S.Pt
Pejabat Penandatangan SPM	: Deasy Zamanti, S.Pt, M.Si
Bendahara	: Ricky Nooraini Hendrarifah, A.Md

Kepala Balai Embrio Ternak
Cipelang-Bogor

Ir. Tri Harsi, MP
NIP 196812261991032 001